BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Semangat reformasi telah membawa bangsa Indonesia pada suasana kehidupan yang sarat dengan harapan. Pada tingkat pertama, tuntutan reformasi tertuju pada aparatur pemerintahan. Rakyat mengharapkan lahirnya pemerintahan yang baik *(good governance)*. Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam era otonomi daerah yang dewasa ini tengah berlangsung di Indonesia, sangat perlu di imbangi peningkatan kinerja yang lebih baik oleh segenap aparatur pemerintah. Hal ini mengingat bahwa dalam era otonomi daerah, akan terjadi fenomena berkembangnya berbagai macam tuntutan dari seluruh lapisan masyarakat agar segenap aparatur pemerintah, baik dari segi kelembagaan, kinerja maupun pelayanan kepada masyarakat melakukan berbagai perubahan menuju kearah perbaikan. Dalam konteks ini semua gerak langkah dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam era otonomi ini dituntut untuk lebih transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah. Salah satu untuk tercapainya suatu penilaian yang baik dan transparan oleh masyarakat, maka pemerintah diwajibkan menyusun suatu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan pada suatu periode tertentu.

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan negara. Untuk membuat suatu

laporan yang dapat diterima dan mudah dimengerti maka pemerintah membuat beberapa peraturan dan ketentuan sebagai acuan atau dasar dalam menyusun laporan keuangan.

Ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baik APBN maupun APBD merupakan inti dari akuntansi keuangan pemerintahan (Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2010: 6).

Akuntansi keuangan pemerintah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Yang dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pemerintah daerah (Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2010: 6).

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (pemda), salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji serta disusun sesuai standar akuntansi pemerintah yang dapat diterima secara umum (Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2010: 1).

Peraturan peundang-undangan yang menjadi acuan dan dasar hukum dalam menyusun laporan keuangan yaitu Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jika dicermati, fenomena yang ada sekitar laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemerintah daerah (LKPD) diantaranya terletak pada faktor ekternal yaitu berubah-rubahnya aturan yang diberlakukan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sejak reformasi tahun 1998, peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah telah mengalami 4 kali perubahan, yaitu sejak diterbitkannya Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah serta Cara Penyusunan APBD. Kemudian diterbitkan lagi Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kedua aturan ini sebagai aturan pengganti Kepmendagri 29 tahun 2002, kemudian disempurnakan lagi dengan Permendagri 59/2007, dan diterbitkan lagi Permendagri 55 tahun 2008

Disamping peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dasar hukum dalam penyusunan laporan keuangan tersebut di atas berubah-rubah, fenomena sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan dan akuntansi sektor publik masih belum memahami dalam mewujudkan suatu akuntabilitas laporan keuangan baik dari masing-masing SKPD maupun pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena perlu adanya suatu pemahaman para pelaksana maupun para pengambil kebijakan dalam rangka menyusun laporan keuangan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain dari fenomena-fenomena tadi dapat diamati pula suatu fenomena dalam perkermbangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya

tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo:2009:20).

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, sedangkan perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Untuk bisa menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, terlebih dahulu disusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara terpisah, juga Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada saat akan disusun laporan keuangan pemerintah daerah, maka laporan keuangan SKPD dan PPKD digabungkan untuk menjadi laporan keuangan tingkat pemda.

Agar mendapatkan gambaran lebih fokus dan lebih parsial dalam penyusunan laporan keuangan serta berdasarkan uraian diatas, maka penyusun merasa perlu untuk meneliti sampai sejauh mana ketepatan dalam pembuatan laporan keuangan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu penulis mengambil judul. **"Tinjauan Atas Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung."**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Adapun identifikasi dan perumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam pokok bahasan penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa aspek yaitu:

1. Kurangnya pemahaman para pejabat dan pelaksana dalam prosedur penyusunan laporan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Tidak tepatnya waktu penyelesaian penyusunan laporan keuangan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga penyusunan laporan keuangan gabungan pun menjadi tidak tepat waktu.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa ruang pekerjaan dibidang pengelolaan keuangan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup cukup banyak yaitu mulai dari perencanaan, perhitungan anggaran dan rincian kegiatannya serta penyusunan laporan akhir tahun, maka penulis membatasi kegiatan serta ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
2. Bagaimana kontribusi dari penyusunan laporan terhadap penyusunan laporan gabungan, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah, sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik melalui Dewan Perwakilan rakyat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitan yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui prosedur penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung serta korelasi dan kontribusinya terhadap penyusunan laporan keuangan secara gabungan, sehingga menjadi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan data dan informasi serta menganalisanya, sehingga diperoleh gambaran obyektif tentang prosedur penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui kontribusi terhadap penyusunan laporan keuangan gabungan secara keseluruhan yang menjadi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan ada guna dan manfaatnya bagi pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari peneletian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Metodologi Penelitian dan Akuntansi Sektor Publik khususnya prosedur penyusunan laporan keuangan pada Satuan Kerja Peranglat Daerah (SKPD) dan umumnya penyusunan laporan keuangan pada Pemerintahan Daerah.
2. Dengan adanya penelitian ini penyusun diharapkan dapat memahami tentang prosedur penyusunan laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap, kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.
2. Di harapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja khususnya para pengelola keuangan di pemerintahan dan umumnya kepada para mahasiswa sebagai bahan perbandingan dalam membuat suatu karya ilmiah yang terkait dengan prosedur penyusunan keuangan sektor publik.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan lokasi dan waktu pelaksanaannya sebagai berikut :

1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penulis melakukan penelitian yaitu di Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bandung yang beralamat di Jalan Raya Sorang Km 17 di Soreang.

1.5.2. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2011 seperti yang terlihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Tahun 2011

NO	Kegiatan Kerja Praktek	Bulan						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt
I	**Tahap Persiapan**							
	1. Mengajukan Penelitian	■	■					
	2. Menentukan Tempat Penelitian	■	■					
II	**Tahap Pelaksanaan**							
	1. Mengajukan Surat Pengantar		■					
	2. Pegumpulan Data		■					
	3. Melakukan Penelitian		■	■	■	■		
III	**Tahap Pelaporan**							
	1. Bimbingan Laporan Tugas Akhir			■	■	■		
	2. Revisi Laporan Tugas Akhir					■		
IV	**Tahap Pengujian**							
	1. Sidang						■	■
	2. Revisi Laporan Tugas Akhir						■	■
V	**Wisuda**							